

# LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

*(SUSTAINABLE FINANCE REPORT)*

TAHUN 2025

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN**  
**LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE FINANCE REPORT*)**  
**PT. BPR CINDE WILIS**  
**TAHUN 2025**

Jember, 27 April 2026

Disusun Oleh,



**Tyas Ayu Saraswati**  
Kepala Biro Operasional

Diketahui,  
Dewan Komisaris



**Paulino Krisnawahjuesa, MBA**  
Komisaris Utama



Disetujui,  
Direksi



**Lucia Primastuti Rahayu, SE**  
Direktur Utama

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>1. PENJELASAN STRATEGI BERKELANJUTAN .....</b>	<b>1</b>
<b>2. IKHTISAR KINERJA BERKELANJUTAN (EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP).....</b>	<b>2</b>
<b>3. PROFIL SINGKAT BPR .....</b>	<b>3</b>
<b>4. PENJELASAN DIREKSI .....</b>	<b>7</b>
<b>5. TATA KELOLA BERKELANJUTAN .....</b>	<b>11</b>
<b>6. KINERJA BERKELANJUTAN .....</b>	<b>14</b>
<b>7. VERIFIKASI PIHAK INDEPENDEN .....</b>	<b>17</b>
<b>8. PENJELASAN PEMANGKU KEPENTINGAN .....</b>	<b>17</b>
<b>9. PENUTUP .....</b>	<b>19</b>

## LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE FINANCE REPORT*) TAHUN 2025

### 1. PENJELASAN STRATEGI BERKELANJUTAN

Strategi berkelanjutan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan menyusun Laporan Keuangan Berkelanjutan.

Prinsip Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Prinsip keuangan berkelanjutan.
2. Tata kelola yang baik.
3. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.
4. Pemberian akses keuangan yang inklusif.
5. Investasi yang bertanggung jawab.
6. Komunikasi yang informatif.
7. Pengembangan sektor unggulan prioritas.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Mencakup sasaran, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan berkelanjutan.
2. Mencakup pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.

BPR mulai menyesuaikan kebijakan yang mendukung pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk memastikan keamanan teknologi layanan pembiayaan, mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, serta melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan. Implementasi ini sejalan dengan dukungan BPR pada pencapaian target Empat Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Tata Kelola.

Budaya berkelanjutan juga ditegakkan melalui himbauan-himbauan di internal Perusahaan, misalnya untuk melakukan efisiensi listrik dan kertas, meningkatkan kepedulian pada lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mengikuti perkembangan inovasi teknologi digital. Manajemen juga mendorong pola pikir dan perilaku karyawan untuk lebih komprehensif memahami aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) serta mampu mengikuti perubahan dunia pembiayaan yang sangat cepat.

Selain itu, manajemen juga mulai menggunakan kendaraan ramah lingkungan (mobil *hybrid*). Sampai dengan tahun 2025 BPR telah menggunakan 2 mobil *hybrid*. Penggunaan mobil *hybrid* membantu menurunkan emisi *scope 1* (emisi langsung dari bahan bakar fosil) karena konsumsi BBM yang lebih efisien dibandingkan mobil konvensional.

## 2. IKHTISAR KINERJA BERKELANJUTAN (EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP)

### a. Aspek Ekonomi

(Rp. ribu)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2025
1	Total Aset	605.611.436	649.779.426	761.584.856
2	Total Pendapatan	83.005.893	90.740.457	108.561.234
3	Total KYD	452.992.782	491.872.698	566.418.125
4	Total Kredit UMKM	407.067.254	446.319.735	513.047.113

### b. Aspek Lingkungan Hidup

No.	Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Penghematan Energi Listrik.	Mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan.	Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor SKK dan Kantor Kas BPR.
2.	Kegiatan Internal Berkelanjutan.	Penghematan Kertas dengan penggunaan teknologi informasi.	Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor SKK dan Kantor Kas BPR.
3.	Penggunaan mobil hybrid.	Penggunaan mobil <i>hybrid</i> membantu menurunkan emisi <i>scope 1</i> (emisi langsung dari bahan bakar fosil) karena konsumsi BBM yang lebih efisien dibandingkan mobil konvensional	Kantor Pusat.

### c. Aspek Sosial

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dimaknai BPR Wilis sebagai bagian dalam berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan dan meyakini bahwa kesinambungan usaha tidak sekedar melalui pencapaian target finansial tetapi juga didukung dengan investasi non keuangan salah satunya melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, BPR Wilis menyisihkan sebagian laba yang diperoleh untuk digunakan membiayai berbagai program CSR yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Keberhasilan program tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak khususnya para pemangku kepentingan untuk terealisasinya pelaksanaan program CSR.

Realisasi program CSR BPR Wilis pada tahun 2025, sebagai berikut:

- Memberikan zakat fitrah untuk warga kurang mampu di wilayah Kantor Cabang BPR Wilis pada bulan Ramadhan.
- Menyerahkan kambing qurban kepada panitia qurban di masjid yang terdekat dengan Kantor Cabang BPR Wilis pada saat Hari Raya Idul Adha.

- c. Bantuan paket sembako untuk panti asuhan, yayasan sosial dan warga yang membutuhkan di wilayah Kantor Cabang BPR Wilis pada bulan Desember menjelang Natal.

Selama periode laporan, BPR belum meluncurkan produk maupun layanan baru, termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perusahaan belum dapat melaporkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif.

### 3. PROFIL SINGKAT BPR

#### 1) Identitas Perusahaan

Nama BPR : PT. BPR Cinde Wilis  
 Alamat Kantor Pusat : Komplek Ruko Gajah Mada Square  
 Jl. Gajah Mada no. 187 Kav. A 17-19 Jember  
 Telepon : 0331-411999  
 Email : info@bprwilis.co.id  
 Wilayah Kerja OJK : Jember

#### 2) Visi dan Misi Berkelanjutan

##### 1) Visi Berkelanjutan

Menjadi BPR yang tangguh dan terpercaya dengan fokus pada pengembangan usaha kerakyatan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

##### 2) Misi Berkelanjutan

Berkontribusi dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan proses yang efektif dan efisien.

#### 3) Daftar Kantor

No	Jenis Kantor	Nama	Alamat	Kota/ Kabupaten	No. Telpon	Status
1.	Pusat	Kantor Pusat Operasional	Jl. Gajah Mada no.187 kav. A 17-19 Kaliwates Jember	Kab. Jember	0331-411999	Aktif
2.	Cabang	Kantor Cabang Bondowoso	Jl. KH. Wahid Hasyim No.168 Kav. 5 Bondowoso	Kab. Bondowoso	0332-423456	Aktif
3.	Cabang	Kantor Cabang Banyuwangi	Jl. PB. Sudirman No. 154 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	0333-425777	Aktif
4.	Cabang	Kantor Cabang Ambulu	Jl. Manggar No.43 Ambulu	Kab. Jember	0336-881999	Aktif
5.	Cabang	Kantor Cabang Lumajang	Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.18 Lumajang	Kab. Lumajang	0334-891319	Aktif
6.	Cabang	Kantor Cabang Probolinggo	Jl. Panglima Sudirman No.18 RT.02 RW.03 Kalirejo Dringu Probolinggo	Kab. Probolinggo	0335-5892999	Aktif
7.	Cabang	Kantor Cabang Pasuruan	Jl. Raya Kraton Dusun Tunggaan 2 Pasuruan	Kab. Pasuruan	0343-6009999	Aktif
8.	Kantor Kas	Kantor Kas Jember Kota	Jl. Diponegoro No. 67 Jember	Kab. Jember	0331-481888	Aktif

No	Jenis Kantor	Nama	Alamat	Kota/ Kabupaten	No. Telpon	Status
9.	Kantor Kas	Kantor Kas Kalisat	Jl. Dr. Wahidin No. 79 Kalisat	Kab. Jember	0331-593777	Aktif
10.	Kantor SKK	Kantor SKK Tanggul	Jl. PB. Sudirman PS 15 Tanggul	Kab. Jember	0336-4464999	Aktif
11.	Kantor Kas	Kantor Kas Balung	Jl. Rambipuji No. 81 Balung	Kab. Jember	0336-622299	Aktif
12.	Kantor SKK	Kantor SKK Gumukmas	Jl. Ahmad Yani No. 68 Gumukmas	Kab. Jember	0336-322999	Aktif
13.	Kantor Kas	Kantor Kas Rogojampi	Jl. Raya Petung No. 201 Rogojampi	Kab. Banyuwangi	0333-636771	Aktif
14.	Kantor Kas	Kantor Kas Purwoharjo	Jl. Jendral A. Yani RT 05 RW 04 Purwoharjo	Kab. Banyuwangi	0333-396999	Aktif
15.	Kantor Kas	Kantor Kas Wongsorejo	Jl. Raya Situbondo No. 115 Desa Sidodadi Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	0333-462121	Aktif
16.	Kantor Kas	Kantor Kas Genteng	Jl. Diponegoro No. 22A, RT. 002 RW. 004 Dusun Krajan, Desa Genteng Kulon, Kec. Genteng	Kab. Banyuwangi	0333-8502999	Aktif
17.	Kantor Kas	Kantor Kas Yosowilangun	Jl. Mayjen Sukartio No. 2 Yosowilangun	Kab. Lumajang	0334-390177	Aktif
18.	Kantor Kas	Kantor Kas Pasirian	Jl. Raya Pasirian No. 25 Pasirian	Kab. Lumajang	0334-5763999	Aktif
19.	Kantor SKK	Kantor SKK Prajekan	Jl. Raya Situbondo RT. 13 RW. 03 Prajekan	Kab. Bondowoso	0332-560111	Aktif
20.	Kantor SKK	Kantor SKK Kraksaan	Jl. Raya Panglima Sudirman RT.01 RW.01 Kraksaan	Kab. Probolinggo	0335-8475999	Aktif

4) Skala Usaha : Total Aset dan Total Kewajiban

(Rp. Ribu)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2025
1	Total Aset	761.584.856
2	Total Kewajiban	713.265.607
3	Total Ekuitas	48.319.249

5) Skala Usaha :Jumlah Karyawan

(1) Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kategori	Jumlah
1	Laki-laki	204
2	Perempuan	100
	<b>Total</b>	<b>304</b>

(2) Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan

No.	Kategori	Jumlah
1	Dewan Komisaris	4
2	Direksi	5
3	Pejabat Eksekutif	21
4	Pegawai	274
	<b>Total</b>	<b>304</b>

(3) Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

No.	Kategori	Jumlah
1	Kurang dari 25 Tahun	39
2	25 – 35 Tahun	129
3	35 – 45 Tahun	93
4	45 – 55 Tahun	35
5	Lebih dari 55 Tahun	8
	<b>Total</b>	<b>304</b>

(4) Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan (Pegawai Tetap)

No.	Kategori	Jumlah
1	Sarjana Strata 3 (S3)	-
2	Sarjana Strata 2 (S2)	2
3	Sarjana Strata 1 (S1)	100
4	Diploma	14
5	SMA/SMK/Sederajat	41
6	Lainnya	-

(5) Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan (Pegawai Tidak Tetap)

No.	Kategori	Jumlah
1	Sarjana Strata 3 (S3)	-
2	Sarjana Strata 2 (S2)	1
3	Sarjana Strata 1 (S1)	93
4	Diploma	10
5	SMA/SMK/Sederajat	43
6	Lainnya	-

(6) Jumlah Karyawan Berdasarkan Ketenagakerjaan (Pegawai Tetap)

No.	Kategori	Jumlah
1	Pemasaran	60
2	Pelayanan	62
3	Lainnya	35

(7) Jumlah Karyawan Berdasarkan Ketenagakerjaan (Pegawai Tidak Tetap)

No.	Kategori	Jumlah
1	Pemasaran	65
2	Pelayanan	52
3	Lainnya	30

## 6) Skala Usaha : Persentase kepemilikan saham

Susunan Pemegang Saham BPR posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nominal	%
1	Paulino Krisnawahjuesa	5.390	5.390.000.000	35,23
2	Yudinata Tjipto Santoso	3.825	3.825.000.000	25,00
3	Haudinata Tjipto Santoso	3.825	3.825.000.000	25,00
4	Oferi Kresnawahjuesa	1.695	1.695.000.000	11,08
5	Vinolia	565	565.000.000	3,69
<b>Total</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300.000.000</b>	<b>100,00</b>

## 7) Wilayah, Keanggotaan Asosiasi, dan Perubahan Signifikan

### Wilayah Operasional

Jangkauan operasional BPR Wilis tersebar di berbagai wilayah Kabupaten meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Hingga akhir Desember 2025, BPR Wilis memiliki 1 Kantor Pusat Operasional, 6 Kantor Cabang, 9 Kantor Kas dan 4 Kantor SKK yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Hingga saat ini, BPR Wilis telah melayani pasar regional dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun jenis Debitur dan Nasabah yang menggunakan produk layanan BPR meliputi Debitur/Nasabah perorangan dan institusi.

### Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha

#### Penghimpunan Dana

(Rp. Ribu)

No.	Produk / Layanan	Jumlah rekening	Oustanding Per 31 Des 2025 (Rp)
1	Tabungan	11.342	50.062.476
2	Deposito	1.008	597.672.748

#### Penyaluran Dana

(Rp. Ribu)

No.	Produk / Layanan	Jumlah rekening	Oustanding Per 31 Des 2025 (Rp)
1	Kredit UMKM	3.962	513.047.113

### Keanggotaan Pada Asosiasi

Perusahaan terlibat dalam asosiasi guna mendapatkan informasi terkini terkait pengembangan industri pembiayaan dan hal - hal yang mempengaruhinya, perkembangan dunia usaha, serta risiko dan peluangnya. BPR Wilis menjadi anggota asosiasi Perbarindo untuk wilayah kerja OJK Jember.

### Keanggotaan Asosiasi

Perusahaan terlibat dalam beberapa asosiasi guna mendapatkan informasi terkini terkait pengembangan industri keuangan berkelanjutan dan hal - hal yang mempengaruhinya, perkembangan dunia usaha, serta risiko dan peluangnya.

Nama Asosiasi	Peran	TMT Keanggotaan
Perbarindo	Anggota	1 November 2011

### Perubahan signifikan

- Terdapat pembukaan Kantor Cabang Pasuruan pada tanggal 8 Agustus 2025.
- Terdapat perubahan status dari Kantor Kas menjadi Kantor Sentra Keuangan Khusus dengan kegiatan layanan penyaluran dana (kredit) sebanyak 4 kantor pada tanggal 1 Agustus 2025.

## 4. PENJELASAN DIREKSI

### 1) Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Berkelanjutan

Laporan keuangan berkelanjutan berisi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada prinsip Keuangan Berkelanjutan. Implementasi ini sejalan dengan respon Perusahaan dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/ POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui laporan ini, Direksi BPR juga mengungkapkan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). POJK No.51/ POJK.03/2017, menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Perusahaan (ekonomi), sosial dan lingkungan hidup.

### 2) Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Mengikuti dinamika bisnis yang semakin kompleks, Direksi BPR menyusun strategi berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Selain memusatkan perhatian pada pencapaian target bisnis dan operasional, Perusahaan juga berupaya mengikuti arahan strategi berkelanjutan dan menyalurkan pembiayaan terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, Perusahaan berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan ramah lingkungan khususnya terkait dengan kegiatan hemat energi dan penghematan penggunaan kertas. Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan kinerja berkelanjutan Perusahaan dan komitmen yang kami jalankan dalam mengimplementasikan program-program berkelanjutan.

### 3) Penjelasan komitmen pimpinan BPR dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penyesuaian untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan sejak dibuatnya RAKB pada 2025. Sepanjang implementasi hingga tahun 2025, Perusahaan menitikberatkan pada penyesuaian kebijakan, dan melaksanakan pelatihan internal. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah kesadaran untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian kebijakan

dan pemetaan kegiatan pembiayaan juga memerlukan kerja sama antar unit kerja sehingga diperlukan koordinasi yang terus-menerus. Direksi berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan, melaksanakan RAKB, serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan kepada para Debitur. Direksi menyadari bahwa tantangan pencapaian Keuangan Berkelanjutan ini masih perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, Direksi BPR mengajak segenap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama membangun budaya berkelanjutan demi mencapai hasil yang optimal untuk tahun-tahun mendatang.

#### 4) Strategi Pencapaian Target

##### (1) Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Terkait Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan merupakan bagian dari risiko bisnis, dalam pelaksanaan pengawasan dibawah Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan terutama Bagian Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai target kinerja Perusahaan.

Strategi pengembangan bisnis kedepan terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan, BPR akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- a) Perusahaan berupaya mencari mitra strategis yang peduli dan ramah kepada lingkungan dan sosial serta peduli kepada kelestarian lingkungan hidup.
- b) Perusahaan terus menjaga reputasi terhadap pihak - pihak antara lain; pemerintah sebagai regulator, para pemegang saham sebagai pendana dan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud aktifitas Perusahaan agar tidak berdampak sosial.
- c) Memakai dan menggunakan infrastruktur yang ramah lingkungan.

##### (2) Pemanfaatan Peluang Dan Prospek Usaha

Peluang dan prospek usaha BPR antara lain berupa dukungan pemerintah kepada BPR untuk membiayai Kategori Kredit Usaha Berkelanjutan/KKUB sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 dan membuka akses keuangan inklusif. Perubahan bisnis yang terjadi dari yang sudah berjalan saat ini menjadi bisnis yang peduli lingkungan juga menjadi salah satu peluang bagi pemberian pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Selain itu, dalam hal teknologi, besarnya peluang untuk menerapkan proses digital dapat membantu meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan.

#### 5) Tantangan Internal

##### a) Permasalahan yang dihadapi dari sisi internal

###### (1) Fokus Bisnis Bank

- Ketergantungan pada sektor tinggi emisi  
Masih tingginya portofolio kredit perbankan pada sektor-sektor yang belum ramah lingkungan, seperti batu bara dan pertanian ekstensif.

- Fokus jangka pendek  
Adanya tekanan untuk mengejar profitabilitas jangka pendek seringkali bertentangan dengan investasi jangka panjang dalam proyek hijau yang memiliki risiko awal lebih tinggi.
  - Belum ada target spesifik  
Banyak lembaga jasa keuangan (LJK) belum memiliki target pengurangan emisi yang jelas, sejalan dengan komitmen *Net Zero Emission*.
- (2) Operasional Bank
- Kurangnya data ESG  
Kesulitan dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang akurat dari nasabah, sehingga sulit mengukur risiko.
  - Manajemen risiko LST  
Tahap implementasi awal masih berfokus pada *negative screening* (menghindari industri kotor) daripada *positive impact investing*.
  - Ketergantungan teknologi  
Ketergantungan pada pihak ketiga/vendor eksternal yang belum menerapkan prinsip berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Internal
- Internalisasi masih awal  
Kebijakan berkelanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam manajemen risiko dan operasional harian bank.
  - Ketidaksesuaian kebijakan  
Belum sepenuhnya selaras antara visi berkelanjutan dengan prosedur persetujuan kredit.
- (4) Keahlian SDM Bank
- Kurangnya literasi & pemahaman  
Masih rendahnya pemahaman karyawan mengenai pentingnya ESG dan cara mengintegrasikannya ke dalam operasional sehari-hari.
  - Kebutuhan kompetensi teknis  
Kurangnya analis kredit yang terlatih khusus untuk menilai risiko lingkungan dan sosial (LST).
- (5) Lainnya
- Dana dan infrastruktur: membutuhkan dana ekstra untuk peningkatan infrastruktur teknologi dan sistem pelaporan, serta keterbatasan data ESG yang konsisten.

- b) Upaya yang dilakukan
- **Peningkatan kompetensi SDM**  
Menyelenggarakan pelatihan dan edukasi internal secara berkala mengenai keuangan berkelanjutan, terutama bagi tim analis kredit dan manajemen risiko.
  - **Pembentukan unit khusus**  
Membentuk unit kerja khusus yang berfokus pada berkelanjutan/ESG, yang bertanggung jawab atas koordinasi dan integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam operasional bank.
  - **Implementasi Kebijakan Uji Tuntas (*Due Diligence*)**  
Menyusun dan menerapkan mekanisme uji tuntas berkelanjutan yang kuat dalam proses pemberian kredit, serta melakukan kampanye efisiensi internal.
  - **Penguatan laporan keuangan berkelanjutan**  
Mengembangkan sistem pelaporan ESG yang transparan sesuai dengan panduan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 51/POJK.03/2017).
  - **Adopsi roadmap dan taksonomi hijau**  
Menggunakan taksonomi hijau Indonesia sebagai acuan untuk mempercepat portofolio pembiayaan pada proyek-proyek ramah lingkungan.

## 6) Tantangan Eksternal

- a) Permasalahan yang dihadapi dari sisi eksternal
- (1) Kebijakan Pemerintah
- **Tumpang tindih regulasi**  
Masih terdapat ketidakselarasan antar peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berbeda, sehingga menyulitkan implementasi di lapangan.
  - **Lemahnya pengawasan**  
Implementasi kebijakan lingkungan seringkali tidak optimal akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.
  - **Kapasitas birokrasi**  
Kapasitas aparatur pemerintah dalam manajemen pembangunan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan untuk memahami dan mengelola keuangan hijau.
  - **Kebutuhan pedoman teknis**  
Perlunya kejelasan lebih lanjut dalam panduan teknis implementasi Peta Jalan (*Roadmap*) Keuangan Berkelanjutan Tahap II.
- (2) Perekonomian Nasional, Regional dan Global
- **Ketergantungan sektor tinggi emisi**  
Portofolio perbankan Indonesia masih cukup rentan karena paparan tinggi pada sektor berbasis batu bara dan pertanian ekstensif.
  - **Divergensi pertumbuhan ekonomi**

Kesenjangan pertumbuhan ekonomi di tingkat global menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan yang memengaruhi arus modal masuk untuk proyek hijau.

- Ketidakpastian global  
Krisis bahan baku atau energi, serta perang teluk, perang dagang, dapat meningkatkan risiko investasi dan mengganggu rantai pasok lokal.

(3) Lainnya

- Keterbatasan pembiayaan (*Funding Gap*)  
Terdapat kesenjangan pembiayaan yang besar antara kebutuhan pendanaan proyek ramah lingkungan (termasuk UMKM) dengan ketersediaan dana, terutama untuk mencapai target *Net Zero Emission*.
- Rendahnya literasi ESG  
Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha (industri) mengenai standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social, and Governance /ESG*).
- Keterbatasan kapasitas SDM  
Keterbatasan kapasitas SDM di industri jasa keuangan untuk memahami dan menerapkan aturan berkelanjutan.

b) Upaya yang dilakukan

- Penguatan kebijakan dan regulasi  
Penyusunan Peraturan OJK (POJK) mengenai keuangan berkelanjutan dan koordinasi dengan kementerian/ Lembaga untuk meredam gejolak ekonomi dan mendorong transisi energi.
- Peningkatan kapasitas dan literasi  
Melakukan edukasi dan pelatihan terkait ESG dan green financing kepada perbankan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi.
- Penguatan akses pembiayaan  
Mendorong inovasi instrumen keuangan untuk pembiayaan UMKM.
- Integrasi ke sistem keuangan  
Mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyampaikan Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) secara berkala.

## 5. TATA KELOLA BERKELANJUTAN

### 1) Prinsip Dasar

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran dengan rincian :

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Transparansi	Perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat untuk para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perusahaan dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan penjelasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026.</li> <li>- Penerbitan Laporan Tahunan 2025.</li> <li>- Penerbitan Laporan Berkelanjutan 2025.</li> <li>- Penerbitan Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, triwulan dan bulanan.</li> <li>- Penerbitan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2025.</li> </ul>
Akuntabilitas	Perusahaan menerapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban, sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat <i>job descriptions</i> yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, seluruh organ Perusahaan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian tugas yang jelas antar organ Perusahaan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>- Menerapkan <i>check and balance system</i>.</li> <li>- Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai-nilai Perusahaan (<i>corporate core values</i>), sasaran usaha, dan strategi Perusahaan.</li> <li>- Memiliki sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</li> </ul>
Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan bidang usahanya, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.</li> <li>- Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).</li> <li>- Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku.</li> </ul>

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Independensi	<p>Kemandirian atau independensi adalah sebuah keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian atau independensi dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ Perusahaan.</li> <li>- Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan.</li> <li>- Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas.</li> <li>- Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.</li> </ul>
Kewajaran	<p>Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin.</p>	<p>Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin.</p>

2) Satuan Kerja

Satuan Kerja	Tugas & Tanggung Jawab
Dewan Komisaris	Mengawasi Kebijakan Direksi Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Direksi	Pengarah/Pengambil Keputusan/Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Kepala Biro Risiko Kredit	Melakukan penyesuaian analisis risiko Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan regulator.
Kepala Biro Pemasaran	Merencanakan peningkatan portfolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Kepala Biro SDM & Umum	Menyusun agenda pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai Keuangan Berkelanjutan.
Kepala Biro Operasional	Menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan ( <i>Sustainability Report</i> ).

3) Program Pengembangan

Aspek	2025	2024	2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	1	-	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	-	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	1	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	-	1	-

4) Struktur Organisasi

Aspek	2025	2024	2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	-	-	-
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	-	-	-

## 6. KINERJA BERKELANJUTAN

### 1) Kegiatan membangun budaya

- Guna membangun budaya berkelanjutan, Perusahaan secara konstan memasukkan *value* berkelanjutan dalam kegiatan yang dilaksanakan seperti meminimalkan penggunaan kertas, menghemat penggunaan listrik dan menyediakan tanaman hijau pada setiap lantai Kantor Pusat BPR Wilis. Budaya berkelanjutan mulai dibangun dengan melibatkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam kegiatan keseharian dalam bekerja.
- Sebagai langkah awal perjalanan menerapkan Keuangan Berkelanjutan, BPR telah melakukan sosialisasi Keuangan Berkelanjutan untuk seluruh pimpinan di Kantor Pusat, termasuk jajaran Direksi dan Komisaris. Selanjutnya, sosialisasi akan dilakukan untuk Kepala Cabang dan Kepala Biro Kantor Pusat. Pelatihan dan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran budaya berkelanjutan dan pentingnya penerapan prinsip berkelanjutan, baik untuk seluruh karyawan, dan Debitur, serta mitra usaha agar bersama-sama mendukung Tujuan Pembangunan Keuangan Berkelanjutan.

## 2) Kinerja keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir

(Rp. Ribu)

Pos	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Realisasi 2025
Total Aset	555.438.079	605.611.436	688.313.144	649.779.426	740.091.614	761.584.856
Total Tabungan	23.868.684	26.985.504	26.419.112	25.385.588	27.837.690	50.062.476
Total Deposito	433.537.686	469.596.611	532.978.950	499.924.151	590.735.840	597.672.748
Total KYD	404.809.505	452.992.782	515.435.174	491.872.698	554.104.195	566.418.125
Total Ekuitas	53.066.290	47.499.362	56.869.231	50.630.700	57.515.137	48.319.249
Laba Tahun berjalan	12.216.150	12.644.410	13.253.693	12.736.513	12.764.046	17.999.178

### Penjelasan Kinerja Keuangan

BPR Wilis mencatat pertumbuhan kredit yang positif. Penyaluran kredit terbesar ada di segmen kredit UMKM. Melalui penyaluran kredit, BPR Wilis turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia seperti yang nampak pada tabel dibawah ini.

## 3) Indikator 3 Tahun Terakhir

(Rp. Ribu)

Pos	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Realisasi 2025
Kredit Mikro	98.111.365	153.966.501	164.836.169	198.125.135	224.737.831	262.252.434
Kredit Kecil	152.999.817	120.123.896	145.095.002	136.882.671	154.816.712	117.506.722
Kredit Menengah	153.698.323	132.976.858	205.504.004	111.311.929	126.169.525	133.287.956
Kredit Lainnya	-	45.925.527	-	45.552.963	48.380.126	53.371.012
<b>Total Kredit</b>	<b>404.809.505</b>	<b>452.992.782</b>	<b>515.435.175</b>	<b>491.872.698</b>	<b>554.104.195</b>	<b>566.418.125</b>

## 4) Komitmen BPR

BPR berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Perusahaan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan. Dalam memberikan layanan jasa keuangan maupun memasarkan produk-produk pembiayaan, BPR menerapkan azas kesetaraan. Bagi seluruh nasabah dan Debitur *existing*, maupun calon nasabah dan calon Debitur akan dilayani dengan baik tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku pada nasabah dan Debitur berkebutuhan khusus/disabilitas Perusahaan akan tetap memberikan pelayanan produk sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan mereka.

## 5) Ketenagakerjaan

Dalam manajemen sumber daya manusia, berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi karyawan, baik wanita maupun pria. Kesempatan yang sama berlaku bagi setiap karyawan tanpa memandang latar belakang ras, suku, agama maupun gender.

### Data Ketenagakerjaan

Gender / Kategori	Jumlah	Persentase
Karyawan Pria	204	67,11%
Karyawan Wanita	100	32,89%
<b>Total Karyawan</b>	<b>304</b>	<b>100%</b>

BPR Wilis memberikan imbal jasa pekerjaan atau remunerasi sesuai dengan beban dan posisi kerja. Pembayaran remunerasi juga merupakan bagian dari nilai ekonomi langsung yang didistribusikan. Pemberian remunerasi tidak membedakan *gender*. Namun, perbedaan dapat terjadi karena status ketenagakerjaan, jenjang jabatan, prestasi kerja, dan lama kerja. Bentuk remunerasi antara lain gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.

Manajemen SDM memperhatikan kualitas dan kompetensi setiap karyawan. Setiap tahunnya, Perusahaan selalu mengusahakan pengadaan pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk seluruh karyawan. Perusahaan juga mengiriskan karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan dilakukan antara lain melalui metode webinar (*online*), pembelajaran kelas (*in class*), *on the job training (OJT)*, dan diskusi grup.

## 6) Masyarakat

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan. BPR telah melakukan berbagai kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala untuk memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat.

Setiap nasabah yang mendapatkan dampak negatif atas layanan Perusahaan, berhak menyampaikan pengaduan. Di BPR Wilis, pengaduan nasabah, termasuk masyarakat, dibedakan menjadi:

- a) Masyarakat selaku nasabah yang melaporkan hal-hal seperti pengaduan, dan ketidakpuasan terkait produk dan layanan Kredit, dugaan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan, dan lainnya;
- b) Masyarakat umum nasabah maupun bukan nasabah, yang melaporkan pengaduan atas kegiatan BPR yang bersinggungan dengan mereka, seperti kegiatan pemasaran produk dan layanan pembiayaan, kegiatan sosial, dan lainnya.

Untuk memberikan respon atas pengaduan yang diterima, Perusahaan memiliki mekanisme dan unit yang menangani pengaduan nasabah. Pengaduan dapat disampaikan melalui email BPR ke [info@bprwilis.co.id](mailto:info@bprwilis.co.id) atau *call center* BPR. Keberadaan Unit Layanan Pengaduan Konsumen akan terus meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, serta menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik, serta memberikan perlindungan kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan.

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan termasuk BPR Wilis. BPR akan melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala untuk memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat.

#### **7) Kinerja Lingkungan**

Kantor pusat dan cabang yang dimiliki BPR Wilis berada di wilayah perkotaan. Dengan demikian, Perusahaan memastikan bahwa tidak ada wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati. Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan juga belum melakukan identifikasi pada Debitur terkait upaya mereka pada pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, BPR Wilis mendukung kelestarian lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemanasan global.

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak menerima pengaduan terkait dampak negatif lingkungan hidup dari pemangku kepentingan, termasuk tidak adanya informasi terkait bencana yang mungkin terjadi pada aktivitas usaha Debitur. Perusahaan juga tidak mendapat laporan pengaduan lingkungan yang berasal dari Debitur atau nasabah. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengeluarkan biaya akibat denda atau ketidakpatuhan pada pelestarian lingkungan hidup.

### **7. VERIFIKASI PIHAK INDEPENDEN**

#### **A. Verifikator Laporan Keuangan Berkelanjutan**

Belum terdapat Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen terkait Kinerja Berkelanjutan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan BPR Wilis Posisi 31 Desember 2025.

#### **B. Verifikator Lembaga Penghitung Emisi**

Belum terdapat Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen yaitu Lembaga Penghitung Emisi terkait Total Emisi (*Scope 1 s.d 3*) dan Pengurangan Emisi pada Laporan Keuangan Berkelanjutan BPR Wilis Posisi 31 Desember 2025.

#### **C. Konsultan Lainnya**

Belum terdapat Verifikasi Tertulis dari Konsultan terkait Kinerja Berkelanjutan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan BPR Wilis Posisi 31 Desember 2025.

### **8. PENJELASAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

#### **A. Pemegang Saham**

Pemegang saham berperan penting dalam memberikan mandat dan arah strategis bagi perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip berkelanjutan. Mereka menuntut transparansi dalam *Sustainable Finance Report* dan memastikan perusahaan memitigasi risiko iklim demi nilai investasi jangka panjang.

- B. Pemerintah  
Pemerintah (Pusat dan Daerah) berperan sebagai pembuat kebijakan (regulator tingkat atas) yang menciptakan iklim investasi hijau melalui insentif pajak, kebijakan energi, dan target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pemerintah juga berkolaborasi dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan.
- C. Otoritas  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah regulator utama yang menerbitkan peraturan (seperti POJK51/2017), menetapkan taksonomi keuangan berkelanjutan (TKBI), serta mengawasi kewajiban laporan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- D. Akademisi  
Akademisi berperan dalam menyediakan kajian, penelitian, dan edukasi terkait isu lingkungan dan sosial. Mereka membantu merumuskan metodologi perhitungan dampak ESG dan meningkatkan kapasitas SDM terkait keuangan berkelanjutan.
- E. Praktisi  
Praktisi (termasuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik) adalah pihak yang menerapkan kebijakan berkelanjutan secara langsung dalam operasional, pembiayaan hijau (*green financing*), dan manajemen risiko portofolio.
- F. Pegawai  
Pegawai merupakan agen internal yang membangun budaya berkelanjutan dalam perusahaan. Keterlibatan mereka mencakup peningkatan kompetensi terkait ESG, penerapan efisiensi energi ditempat kerja, serta komitmen terhadap etika bisnis.
- G. Nasabah  
Nasabah (investor, debitur, maupun pengguna layanan keuangan) menjadi pendorong permintaan produk keuangan hijau, seperti kredit perumahan rendah emisi, reksa dana ESG, atau obligasi hijau. Nasabah juga pihak yang menerima manfaat langsung dari pembiayaan berkelanjutan.
- H. Lainnya  
Pemangku kepentingan lainnya meliputi:
- Masyarakat/LSM : Pihak yang terdampak operasi perusahaan dan melakukan pengawasan sosial.
  - Mitra Rantai Pasok : Pihak yang terlibat dalam aktivitas usaha yang mematuhi standar berkelanjutan.
  - Media : Pihak yang menyebarkan informasi dan transparansi terkait kinerja berkelanjutan perusahaan.

## 9. PENUTUP

Dengan demikian, Laporan Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 ini kami tutup. Tahun 2025 telah menjadi bukti nyata dari komitmen kami untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, kami akan terus memperkuat langkah-langkah strategis menuju masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Report*) Tahun 2025 kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.